

**PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA 1953-1972
DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN KELAS XII SMA**

Oleh:

Nana Aditiya¹

Saiful Bachri, Tri Yuniyanto²

ABSTRACT

The purpose of this study was to know: (1) Rationale of Economic Democracy Mohammad Hatta, (2) Thought Muhammad Hatta on social economy. (3) The relevance of thought Muhammad Hatta in the Indonesian economy.

This research used the Historical research or historical method. Data source in this study are used primary sources and secondary sources. Historical method is Heuristic process, Criticism, Interpretation, Historiography reconstructed based on the data obtained so as to produce events or Historical Facts.

Based on this research can be concluded: (1) Rationale of democratic economy Mohammad Hatta, his biography that tells Hatta's life began as a child, studied in the Netherlands, fought for independence of Indonesian, until he died in 1980. Then, when Hatta as an economist. Mohammad Hatta is a pioneer or rationale of economy that democracy based, the concept is the first foundation in building the economy in Indonesia. (2) Thought for Economic Democracy Mohammad Hatta, Hatta choose cooperation as a way out of the Indonesian nation out of economic problems faced during this. Hatta said that the cooperative consists of two joints, the joints of solidarity and joint individualist. While the rest of cooperatives are people, not money and cooperatives are not looking for maximum profit, but to serve the needs of joint and container participation of small-scale economic actors. Hatta argue with the spirit of togetherness and family as well as cooperation in the cooperative can deliver the Indonesian nation to achieve the goals and ideals of development. (3) The relevance of thought Mohammad Hatta in the Economic and Social part, as well as the relevance of Hatta's thought with economical that occurred in Indonesia at this time.

Keywords: *Hatta, Economic Democracy, and Cooperative.*

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS.

² Dosen Pembimbing Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS.

Keadaan ekonomi di Indonesia pasca kemerdekaan bisa terbilang sangat kacau dan terjadi inflasi yang hebat di kalangan masyarakat Indonesia akibat dari pendudukan Jepang atas Indonesia. Belum lagi adanya blockade yang dilakukan oleh tentara NICA yang membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk karena tidak bisa berhubungan langsung dengan negara-negara lain untuk melakukan perdagangan. Ekonomi Indonesia yang semakin memburuk membuat para tokoh nasional menggunakan berbagai cara ditempuh agar ekonomi Indonesia bisa normal kembali. Baru mulai Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Mulai dari pinjaman nasional sampai konferensi ekonomi yang dilakukan di Solo yang dimana Mohammad Hatta ikut aktif dalam konferensi ekonomi tersebut (Mubyarto, 1999).

Di Indonesia sering adanya harapan untuk menghidupkan lagi ekonomi kerakyatan, karena pengalaman ketika krisis multidimensi tahun 1997-1998 usaha kecil terbukti mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ekonomi kerakyatan memainkan fungsi penyelamatan di sektor kegiatan, fungsi penyelamatan ini terbukti pada sektor penyediaan kebutuhan rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi. Sehingga dengan adanya pengalaman-pengalaman serta prestasi-prestasi tersebut, diharapkan dalam masa-masa mendatang pemerintah mau untuk memperhatikan dan mulai melirik ekonomi kerakyatan (Strisno, 2005).

Muhammad Hatta membagi usaha di bidang ekonomi menjadi tiga macam sektor usaha yaitu ; Koperasi, Pemerintah dan Swasta. Baginya ketiga sektor usaha tersebut jelas, karenanya Mohammad Hatta bersama para pejuang kemerdekaan yang menyusun pasal 33 UUD 1945, dalam pasal tersebut Mohammad Hatta mengharapkan bahkan menuntut agar hal tersebut benar-benar dilaksanakan sebagai landasan dasar ekonomi rakyat dan negara (Noer, 1990). Mohammad Hatta juga berpendapat mengenai Koperasi yang harus digunakan di Indonesia karena sistemnya tepat bila diaplikasikan di Indonesia sebab kultur orang Indonesia yang Sosialis. Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang

berkembang di Indonesia, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki landasan konstitusional, yaitu berpegang pada pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 1 yang menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa bangun usaha yang paling tepat dengan asas kekeluargaan adalah koperasi. Dimana seluruh hal yang menyangkut dengan koperasi adalah hal untuk kesejahteraan anggotanya oleh sebab itu Muhammad Hatta yakin bahwa koperasi adalah sistem ekonomi yang cocok digunakan di Indonesia.

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Pada tahun 1896 didirikan Bank Pertolongan dan Tabung dengan tujuan membantu rakyat yang terjerat hutang dengan renternir. Bank tersebut juga dikenal sebagai Bank Priayi, karena pada saat itu hanya sebatas lingkungan pegawai negeri saja. (Suradjiman, 1963).

Pada tanggal 12 Juli 1951, Mohammad Hatta menyampaikan pidato untuk menyambut hari koperasi di Indonesia. Menurut Mohammad Hatta, tujuan negara ialah memakmurkan rakyat, dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan. Pada kongres koperasi 17 Juli 1953 Mohammad Hatta ditetapkan sebagai ‘Bapak Koperasi Indonesia’. Keputusan pengangkatan Mohammad Hatta sebagai bapak koperasi berdasarkan atas besarnya aktivitas Mohammad Hatta dalam gerakan koperasi. Bung Hatta memiliki misi untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat Mohammad Hatta untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dengan menyusun perekonomian dengan asas kekeluargaan lebih tepat dengan menerapkan manajemen koperasi. Konsep pembentukan koperasi dirancang dengan penuh pertimbangan. Dan bisa dikatakan Mohammad Hatta adalah orang pertama yang gigih mengusahakan konsep koperasi untuk dijadikan konsep perekonomian rakyat di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Politik Ekonomi

Tujuan politik perekonomian dalam pandangan Hatta ialah menaikkan tenaga beli rakyat secara berangsur-angsur(Hatta,1992). Karena menurut Hatta rakyat tidak akan pernah terlepas dari kesengsaraan hidup, apabila tenaga beli riilnya tidak bertambah dan perkembangan ekonomi suatu negara akan tetap tertahan, kalau rakyat didalamnya tetap miskin, oleh karena itu rencana pembangunan harus didasarkan atas kenaikan tenaga beli yang meningkat(Hatta,1992).

Selanjutnya dalam menyelenggarakan kemakmuran, Hatta berpendapat harus menyelenggarakan lebih dulu kepentingan rakyat yang terpenting, yaitu makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Menurutnya kepentingan yang lima ini merupakan suatu hal yang penting dan esensial bagi kehidupan manusia dan bangsa yang beradap, dalam pemenuhan tersebut, Hatta menghendaki asas *self-supporting* atau “menolong diri sendiri”, walaupun Hatta menyadari bahwa proses menuju “menolong diri sendiri” itu memerlukan waktu yang lama dan cukup panjang dan tentu pada awalnya juga memerlukan bantuan luar negeri (Hatta,1954).

Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, tampak jelas sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Hatta dalam bidang ekonomi, baik pemikiran ekonomi yang sifatnya makro maupun mikro. Dalam demokrasi ekonomi ini juga menjadi landasan dari pemikiran Hatta dalam masalah pembangunan ekonomi secara nasional. Dalam pandangan Hatta, pembangunan ekonomi nasional terdapat dua cara yang sangat utama dan fundamental sifatnya yaitu:

Pertama, pembangunan yang kecil-kecil dan sedang besarnya dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang berangsur-angsur, dari kecil, sedang, menjadi besar, dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri.

Kedua, pembangunan yang besar-besar dikerjakan oleh pemerintah atau dipercayakan kepada badan-badan hukum yang tertentu dibawah penguasaan atau

pengawasan pemerintah. Pedoman bagi segala usaha tersebut ialah mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan segala kegiatan politik yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat(Hatta,1971).

Sistem Ekonomi

Struktur ekonomi nasional adalah struktur yang kuat, tidak tergantung pada pengaruh kekuatan luar, bersifat “*resources-oriented*” yang dilengkapi dengan “*needs oriented*”. Bagi Indonesia, struktur ekonomi nasional merupakan struktur yang secara sektoral seimbang, sektor pertanian kuat, sektor industri kuat, dan sektor jasanya juga kuat.Suatu sektor dengan sektor perniagaan luar negeri yang kuat, tetapi tidak terpengaruh oleh konjungtur dunia dan lain-lain (Soetrisno, 1984).

Struktur ekonomi nasional berbanding terbalik dengan struktur ekonomi kolonial.Struktur ekonomi kolonial merupakan struktur ekonomi yang berorientasi pada kepentingan negara induk atau negara penjajah.Sedangkan sentralnya adalah kepentingan penduduk atau pemerintah negara induk. Daerah jajahan menjadi tempat mendapatkan dan mengusahakan bahan mentah, hasil tambang, bahan galian dan lain-lain.Selain itu, daerah jajahan juga merupakan tempat pemasaran hasil produksi negara induk.Hal tersebut sejalan dengan identifikasi Bung Karno terhadap watak ekonomi kolonial bangsa Indonesia.Pertama, diposisikannya perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju.Kedua, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai pasar produk negara-negara industri maju.Ketiga, dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara industri maju.Latar belakang seperti itu, mengakibatkan ekonomi Indonesia merdeka, yang oleh Bung Karno disebut sebagai ekonomi nasional dan harus menjadi koreksi total terhadap ciri-ciri ekonomi kolonial.

Dasar politik perekonomian Indonesia termaktub dalam UUD 1945 dalam Bab Kesejahteraan Sosial Pasal 33 (pidato Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946). Sumitro

Djojohadikusumo, dalam pidatonya dihadapan “*School of Advanced International Studies*” Washington D.C tanggal 22 Februari 1949 jugamenegaskan bahwa yang dicita-citakan ialah ekonomi campuran, dengan nasionalisasi pada sektor-sektor tertentu sehingga bisa dijalankan oleh pemerintah sedangkan yang lainnya akan terus terletak dalam lingkungan usaha partekelir. Meskipun sistem perekonomian Indonesia sudah cukup jelas dirumuskan oleh tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang sekaligus menjadi tokoh pemerintahan pada awal berdirinya Republik Indonesia, dalam perkembangannya pembicaraan tentang sistem perekonomian Indonesia tidak hanya berkisar pada sistem ekonomi campuran, tetapi mengarah pada suatu bentuk baru yang disebut Sistem Ekonomi Pancasila.

Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta

Mohammad Hatta, menjelaskan ekonomi rakyat dan kerakyatan pada saat itu (masa kolonialisme) adalah ekonomi masyarakat pribumi (penduduk asli Indonesia) atau kaum inlanders, yang merupakan bagian terbawah dan terbesar dalam masyarakat colonial (Arif,2001).Koperasididirikansebagaipersekutuankaumyanglemahuntukmembela keperluanhidupnyadenganongkossemurah-murahnya,itulahyangdituju.Padakoperasi didahulukankeperluan bersama,bukan keuntungan(Hatta, 1954).

Muhammad Hatta dalam membagi usaha dibidang ekonomi Mohammad Hata menyebutkan tiga macam sektor usaha besar yaitu; Koperasi, Pemerintah dan Swasta. Baginya ketiga sektor usaha besar tersebut jelas, karenanya dia bersama koleganya yang menyusun pasal 33 UUD 1945, mengharapkan bahkan menuntut agar satu hal tersebut benar-benar dilaksanakan sebagai landasan dasar ekonomi rakyat dan negara.

Gagasan koperasi yang dicetuskan oleh Hatta sebagai bentuk organisasi ekonomi rakyat Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan koperasi di Denmark yang dikaitkannya dengan kehidupan ekonomi politik di negara itu. Hatta tampaknya mempunyai pandangan yang sama dengan Ravnholt bahwa dasar-dasar demokrasi ekonomi yang dijalankan dalam perkumpulan koperasi akan

menjadi landasan utama bagi kehidupan demokrasi politik. Dalam pidatonya diradio untuk menyambut hari koperasi yang ketiga pada tanggal 11 juli 1953, Hatta mengutip pernyataan Ravholt yang dikemukakan dalam bukunya *The Danish Cooperative Movement*(Arief,2002).

Ekonomi Kerakyatan

Koperasi adalah suatu sistem ekonomi mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat di Indonesia karena memiliki dasar konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Tafsiran itu sering dikemukakan oleh Hatta, yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut. Koperasi bagi Hatta bukan sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat lemah untuk dapat mengendalikan pasar, sehingga koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar dengan cara menerapkan prinsip efisiensi (Hatta, 1957).

Koperasi bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan koperasi. Dengan cara itulah sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri (Hatta, 1957).

Hatta menganjurkan didirikannya 3 macam koperasi. Pertama, koperasi konsumsi yang berfungsi untuk melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai; Kedua, koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan); Ketiga, koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta juga menganjurkan pengorganisasian industri kecil dan koperasi produksi, guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil. Tujuan koperasi bukan

mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil, tetapi tidak berarti bahwa koperasi identik dengan usaha skala kecil.

Pembelajaran Sejarah

Pembelajaran sejarah memiliki peran mengaktualisasikan dua unsur pembelajaran dan pendidikan. Unsur pertama adalah pembelajaran (*instruction*) dan pendidikan intelektual (*intellectual training*), dan unsur kedua adalah pembelajaran dan pendidikan moral bangsa dan civil society yang demokratis dan bertanggung jawab kepada masa depan bangsa. Unsur pembelajaran (*instruction*) dan pendidikan intelektual (*intellectual training*) pada pembelajaran sejarah tidak hanya memberikan gambaran masa lampau, tetapi juga memberikan latihan berpikir kritis, menarik kesimpulan, menarik makna dan nilai dari peristiwa sejarah yang dipelajari. Latihan berpikir kritis dilakukan dengan pendekatan analitis, salah satunya melalui pertanyaan “mengapa” (*why*) dan “bagaimana” (*how*) dapat melatih siswa berpikir kritis dan analitis, berbeda dengan bentuk pertanyaan “siapa” (*who*), “apa” (*what*), “dimana” (*where*) dan “kapan” (*when*).

Pembelajaran sejarah juga menekankan pada cara berpikir, bernalar, kematangan dan emosional dan sosial, serta meningkatkan kepekaan perasaan dan kemampuan mereka untuk memahami dan menghargai perbedaan. Pembelajaran sejarah adalah bagian dari proses penanaman nilai-nilai yang fungsional untuk menanamkan pengetahuan (Abbas, 1998).

Pembelajaran di sekolah merupakan salah satu wahana mencapai tujuan pendidikan nasional, terutama sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan peserta didik (Wiriaatmadja, 1998). Pengetahuan peserta didik tentang sejarah diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan dan kearifan dalam menghadapi kehidupan masa kini. Kesadaran akan kebangsaannya dapat menumbuhkan kepribadian yang tegar, karena pengenalan jatidirinya akan menumbuhkan kemauan dan kesediaan bekerja keras bagi diri dan bangsanya.

Pembelajaran sejarah memiliki fungsi untuk membangkitkan minat kepada sejarah tanah airnya dan mendapatkan inspirasi sejarah dari kisah-kisah kepahlawanan maupun peristiwa-peristiwa tragedi nasional, memberi pola berpikir ke arah berpikir secara rasional-kritis-empiris dan mengembangkan sikap mau menghargai nilai-nilai kemanusiaan (Kartodirdjo, 1982).

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengambil masalah tentang Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1953-1972, yang disajikan secara deskriptif, bukan merupakan pernyataan jumlah dan tidak dalam bentuk angka-angka. Hal ini didasari dengan pernyataan “Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka dan frekuensi” (Sutopo, 2002).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Metode Sejarah. Menurut Gilbert J. Garraghan yang dikutip Dudung Abdurrahman (2007: 53), menjelaskan “metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan *sintesis* dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis”. Metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah (Daliman, 2012).

Metodologis yang digunakan penulis adalah dengan metode historis, dengan penelusuran sumber melalui studi pustaka sehingga memudahkan penulis dalam menelusuri sumber. Pada saat melaksanakan proses penelusuran sumber, ditemukan berbagai macam sudut pandang sehingga menyebabkan penulis harus melaksanakan kritik sumber dengan benar dan memakan waktu yang lama. Masalah pemaknaan dan pengklasifikasian data penulis sering menemui kesulitan dalam melaksanakan penulisan, sehingga penulis harus melaksanakan pemilahan materi kembali sebagai sumber utama pembahasan.

Analisis data penelitian adalah teknik dalam memeriksa dan menganalisis data sehingga akan menghasilkan data yang benar dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis historis. Analisis data historis lebih dikenal dengan penafsiran atau interpretasi sejarah. Interpretasi sejarah sering disebut juga dengan analisis sejarah (Abdurrahman, 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta

Mohammad Hatta atau yang sering dikenal Bung Hatta adalah tokoh proklamator Republik Indonesia bersama Soekarno. Hatta telah banyak berbuat dan berjasa bagi negara ini. Bahkan Hatta dikenal sebagai salah seorang arsitek dan peletak dasar-dasar demokrasi politik dan ekonomi ke dalam konstitusi Negara RI. Hatta juga telah meletakkan hal-hal yang berhubungan dengan tanggungjawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadikan koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan perekonomian rakyat. Oleh karena peran dan jasa-jasanya tersebut Hatta telah dianggap sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat dan Bapak Ekonomi Rakyat, oleh karena itu Hatta patut diberi gelar sebagai Bapak Koperasi (Abbas, 2010).

Hatta menilai bahwa ilmu ekonomi termasuk ilmu moral (dan kemanusiaan), di Indonesia Hatta terkait erat pada UUD 45, pada sistem itu ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 bukanlah sistem ekonomi liberal ala *political economy* (economic) mazhab klasik yang masih mempercayai negara sebagai kontrol ekonomi dan neo klasik. yang menghendaki campur tangan sekecil mungkin negara atas sistem ekonomi pasar. Di dalam ekonomi terpimpin, pemerintah mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan cita-cita UUD 1945, dan tidak berdasarkan pada mekanisme pasar bebas tak terkendali seperti pada sistem ekonomi liberal. Muhammad Hatta sebagai pelopor atau peletak dasar pemikir ekonomi yang berbasis kerakyatan, konsep yang Hatta bangun adalah merupakan tonggak pertama dalam membangun

perekonomian di Indonesia. Bangunan konsep ini dikembangkan berdasarkan kondisi riil masyarakat Indonesia.

Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta

Berbicara mengenai ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi memang tidak dapat dipisahkan dari Mohammad Hatta. Sebagai Bapak Pendiri Bangsa dan sekaligus sebagai seorang ekonom pejuang, Hatta tidak hanya telah turut meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan sebuah negara merdeka dan berdaulat berdasarkan konstitusi. Hatta juga memainkan peranan yang sangat besar dalam meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Bahkan, sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Hatta yang secara konsisten dan terus menerus memperjuangkan tegaknya kedaulatan ekonomi rakyat dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Demokrasi ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, tampak jelas sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Hatta dalam bidang ekonomi, baik pemikiran ekonomi yang sifatnya makro maupun mikro. Demokrasi ekonomi menjadi landasan dari pemikiran Hatta dalam masalah pembangunan ekonomi secara nasional (Hatta, 1971). Sedangkan Koperasi Hatta menjelaskan bahwa dalam koperasi terdapat suatu tujuan yang utama yaitu menyelenggarakan keperluan hidup bersama dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki nasib orang-orang yang lemah ekonominya dengan jalan kerjasama. Dalam menguraikan tujuan koperasi, Hatta menganalogikan bahwa antara satu individu dengan individu yang lain seperti sebuah sapu lidi, yang mana kalau lidi itu berjalan sendiri-sendiri menjadi lemah dan mudah patah. Tetapi apabila diikat menjadi sapu, maka akan menjadi satu kesatuan yang kuat dan tak mudah patah. Oleh karena itu tidak seperti sebuah badan usaha pada umumnya, koperasi tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan layaknya firma dan perseroan. Walaupun pada akhirnya koperasi memperoleh keuntungan, namun keuntungan itu bukan suatu tujuan (Hatta, 1971).

Keterlibatan Hatta dalam meletakkan konsep dasar perekonomian sangat besar melalui perannya sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Hatta banyak

mengemukakan ide-idenya kepada panitia perentjana Undang-undang Dasar. Hatta menghendaki agar negara baru itu disusun atas dasar gotong-royong dan usaha bersama, Hatta menyebutkan dengan istilah kolektivisme (Hatta, 1956). Ide-ide Hatta mendasari penyusunan dasar Negara, terutama pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian itu itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Gagasan koperasi yang dicetuskan oleh Hatta sebagai bentuk organisasi ekonomi rakyat Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan koperasi di Denmark yang dikaitkannya dengan kehidupan ekonomi politik di negara itu. Hatta tampaknya mempunyai pandangan yang sama dengan Ravnholt bahwa dasar-dasar demokrasi ekonomi yang dijalankan dalam perkumpulan koperasi akan menjadi landasan utama bagi kehidupan demokrasi politik. Dalam pidatonya diradio untuk menyambut hari koperasi yang ketiga pada tanggal 11 juli 1953, Hatta mengutip pernyataan Ravholt yang dikemukakan dalam bukunya *The Danish Cooperative Movement* (Arief, 2002).

Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI dalam pidato Hari Koperasi pertama tanggal 12 Juli 1951 bahwa koperasi mempunyai tugas dalam meningkatkan kemakmuran dilihat dari tempat, waktu, dan keadaan, yaitu :“(1) Memperbanyak produksi, terutama produksi barang makanan dan barang kerajinan dan pertukaran yang diperlukan sehari-hari oleh rakyat kita dalam rumah tangganya; (2) Memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan rakyat; (3) Memperbaiki distribusi, pembagian barang kepada rakyat; (4) Memperbaiki harga, yang menguntungkan bagi masyarakat; (5) Menyingkirkan penghisapan dari lintah darat; (6) Memperkuat pemanduan kapital; (7) Memelihara lumbung simpanan padi atau mendorong supaya tiap-tiap desa menghidupkan kembali lumbung desa (Hatta, 1951). Hal inilah yang menjadi dasar diangkatnya Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1953 di Bandung, karena dedikasi dan pemikirannya atas Koperasi.

Relevansi Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta dengan Kondisi Perekonomian Indonesia Saat ini.

Hatta mengawali penerapan koperasi dengan mendirikan tiga jenis koperasi. Pertama, koperasi konsumsi, di dunia barat jenis koperasi ini mendapat jumlah yang banyak dan pertama pula didirikan. Koperasi konsumsi didirikan sebab masalah yang mayoritas dialami bangsa Indonesia mengenai keperluan barang konsumsi dengan harga yang semurah-murahnya terutama bagi rakyat kecil. Kaum buruh memiliki peran untuk berusaha memajukan koperasi, karena kaum buruh yang menghasilkan barang kemudian dibelinya dengan upah yang diterimanya. Upah yang kecil seiring dengan keperluan membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari yang mahal, menjadikan kaum buruh tertarik kepada koperasi konsumsi (Hatta, 1960).

Kedua, koperasi kredit yang didirikan untuk membantu keperluan anggotanya akan kredit. Anggota pada koperasi kredit mayoritas para pedagang kecil dan para petani kecil. Mereka biasanya kekurangan modal, dan tidak mendapat kredit dari bank besar. Berbeda dengan koperasi konsumsi yang menjual barang kepada orang lain yang bukan anggota, koperasi kredit hanya meminjamkan uang kepada anggotanya saja. Rasa individualitas pada koperasi kredit ini sangat dianjurkan, sebab dengan rasa individualitas menanamkan rasa ingin maju serta kesadaran pada diri anggotanya. Apabila perasaan individualitas tidak ada, maka yang ada hanya menguntungkan diri sendiri. Batas waktu peminjaman sudah ditentukan, apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan mereka dikenakan denda (Hatta, 1960).

Ketiga, koperasi produksi yang banyak terdapat pada negara agraria atau pertanian seperti Denmark. Indonesia yang juga negara agraria diharapkan mampu memajukan koperasi produksi ini. Bagi negara yang berbasis pertanian, koperasi produksi menjadi cita-cita yang tinggi. Pertanian sejak awal sifatnya bersama, semangat tolong menolong sangat kuat pada para petani, hal ini terbawa sampai keadaan masyarakatnya. Pekerjaan para petani yang menggarap sawah, seperti menanam padi, buah serta mengangkut hasilnya dilakukan secara bersama. Pada dasarnya sudah ada semangat koperasi pada para petani. Rasa individualitas dan solidaritas perlu ditanamkan pada koperasi produksi. Rasa individualitas diperlukan

untuk memberi kesadaran kepada semua anggota untuk semangat berjuang membela kepentingan bersama.

Rasa solidaritas perlu pula ditanamkan sebab dengan solidaritas yang tinggi seperti usaha membawa hasil barang produksi untuk dipasarkan ke suatu tempat perlu rasa solidaritas kebersamaan. Hatta menganjurkan agar didirikan industri kecil dan koperasi produksi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Koperasi produksi hasilnya banyak yang meleset, hanya koperasi produksi di daerah pertanian yang berhasil. Wujudnya adalah memperbaiki harga penjualan barang. Koperasi produksi dapat membantu si penghasil agar tidak tergantung lagi kepada pabrik yang membeli barangnya sebagai bahan. Koperasi produksi membuat mereka dapat mendirikan pabrik sendiri, dan dapat mengerjakan sendiri bahan tersebut menjadi barang jadi. Manfaat koperasi produksi bagi para petani dapat meningkatkan kedudukan ekonominya, para petani juga dapat mempunyai uang simpanan (Hatta, 1960).

Koperasi memberikan jalan bagi rakyat untuk memperbaiki ekonominya, seperti koperasi kredit yang didirikan bagi rakyat yang kekurangan modal untuk usaha, koperasi konsumsi yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat sehari-hari yang menjual barang-barang keperluan rakyat dengan harga yang murah. Hatta sebagai seorang pemuda yang bercita-cita agar Indonesia merdeka, merdeka di segala bidang tak terkecuali ekonomi. Hatta menginginkan ekonomi rakyat yang makmur dan sejahtera, tidak ada kemiskinan. Ketertarikan Hatta mempelajari koperasi setelah Hatta mengetahui koperasi di negeri Eropa sangat bermanfaat bagi perekonomian rakyat.

Keberadaan koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Setidaknya terdapat tiga bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat: *Pertama*, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Pada tingkatan ini biasanya koperasi sebagai penyedia pelayanan

kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain atau lembaga usaha lain tidak dapat melaksanakannya akibat adanya hambatan peraturan. Peran koperasi terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank. Juga dapat dilihat pada beberapa daerah yang dimana aspek geografis menjadi kendala bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan dari lembaga selain koperasi yang berada di wilayahnya.

Kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi demikian masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota atau bukan anggota dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada tingkat yang lebih tinggi dilihat dari peranan bagi masyarakat. Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasi mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lain. Demikian pula dengan koperasi kredit.

Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki itu menjadi faktor utama penyebab koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama menghadapi kesulitan. Sebagai contoh, saat kondisi perbankan tidak menentu dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, loyalitas anggota Koperasi membuat anggota tersebut tidak memindahkan dana yang ada dikoperasi ke bank. Berdasarkan ketiga kondisi diatas, maka wujud peran yang diharapkan sebenarnya adalah agar koperasi dapat menjadi organisasi milik anggota sekaligus mampu menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain.

KESIMPULAN

Keadaan ekonomi rakyat Indonesia pasca proklamasi yang sangat memprihatinkan membuat Hatta semangat dalam memperjuangkan kemakmuran rakyat. Ekonomi rakyat Indonesia berada di golongan bawah meskipun berada di tanah air sendiri. Melalui proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, ekonomi kerakyatan mulai dimunculkan untuk melepaskan rakyat dari tekanan kapitalisme global abad 19 dan 20. Perhatian terhadap sistem ekonomi kerakyatan dicurahkan oleh Hatta, Hatta berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi kerakyatan. Hatta juga telah meletakkan hal-hal yang berhubungan dengan tanggungjawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadikan koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan perekonomian rakyat. Maka yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi, Hatta mencoba mempraktekan pemikirannya itu pada koperasi, sebagaimana yang telah ada dan terbukti hingga sekarang ini.

Hatta mempunyai pandangan yang besar mengenai pengertian kerakyatan, demokrasi, dan arti penting demokrasi ekonomi sebagai salah satu pilar model demokrasi sosial yang cocok bagi Indonesia merdeka. Hatta tidak percaya kepada sistem ekonomi kapitalisme yang ada untuk mengelola dan mengorganisir ekonomi bangsa. Hatta berpendapat bahwa satu satunya cara untuk dapat menggerakkan rakyat Indonesia keluar dari penderitaan ekonomi, yaitu dengan menggunakan sistem ekonomi sosialisme. Bukan ekonomi sosialisme versi Marxisme yang diadopsi oleh bangsa Indonesia, tetapi ekonomi sosialisme yang bernafaskan konsepsi bangsa Indonesia.

Demokrasi ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, tampak jelas sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Hatta dalam bidang ekonomi, baik pemikiran ekonomi yang sifatnya makro maupun mikro. Dalam demokrasi ekonomi ini juga menjadi landasan dari pemikiran Hatta dalam masalah pembangunan ekonomi secara nasional. Hatta, juga menjelaskan mengenai ekonomi rakyat dan kerakyatan pada masa kolonialisme adalah ekonomi masyarakat pribumi, yang merupakan bagian terbawah dan terbesar dalam

masyarakat kolonial. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk mencukupi keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju oleh koperasi. Koperasi mendahulukan keperluan atau kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi maupun keuntungan. Hatta membagi usaha dibidang ekonomi Indonesia menjadi tiga macam sektor usaha besar yaitu; Koperasi, Pemerintah dan Swasta. Bagi Hatta ketiga sektor usaha besar tersebut sudah jelas tujuannya, karenanya Hatta bersama koleganya yang menyusun pasal 33 UUD 1945, mengharapkan bahkan menuntut agar satu hal tersebut benar-benar dilaksanakan sebagai landasan dasar ekonomi rakyat dan negara.

Hatta mengawali penerapan koperasi dengan mendirikan tiga jenis koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit dan koperasi produksi. Dengan adanya koperasi Hatta jelas sangat memperhatikan keberadaan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan lain-lain. Hal itu terbukti ekonomi rakyat dengan koperasi sebagai instrumennya mampu bertahan dari badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997. Hatta dalam menyiasati pembangunan bangsa Indonesia tidak jera dengan masalah utang luar negeri akan tetapi utang luar negeri harus ada syarat-syarat yang disebutkan. Karena dengan hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan diadakannya transmigrasi, industrialisasi, pemanfaatan sumber daya alam dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Abbas. (2008). *Bung Hatta & Ekonomi Islam: Pergulatan Menangkap Makna keadilan dan Kesejahteraan*. Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan.

Arifin Sitio, dkk. (2001). *Koperasi Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

Dawam Raharjo. (1997). *Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21*. Jakarta: Dekopin.

_____. (2003). " *Apa Kabar Koperasi Indonesia* ", dalam *Bung Hatta*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Deliar Noer. (1990). *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.

- Ediliusdan Sudarsono. (1993). *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- I Wangsa Widjaya. (2002). *Mengenang Bung Hatta*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Kartini Kartono. (1983). *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandai Maju.
- _____. (1976). *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni.
- Koentjaraningrat. (1977). *Metode-Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Erlangga Gramedia.
- _____. (1997). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- M.D Sagimun. (1965). *Indonesia Berkoperasi*. Djakarta: P.N Balai Pustaka.
- Miriam Budiardjo. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad Hatta. (1952). *Kumpulan Karangan Jilid I*. Jakarta: Penerbit dan balai buku Indonesia.
- _____. (1953). *Kumpulan Karangan Jilid II*. Jakarta: Penerbit dan balai buku Indonesia.
- _____. (1954). *Kumpulan Karangan Jilid III*. Jakarta: Penerbit dan balai buku Indonesia.
- _____. (1960). *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan ke Ekonomi dan Pembangunan*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- _____. (1966). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press
- _____. (1967). *Ekonomi Terpimpin*. Djakarta: Penerbit Djembatan.
- _____. (1968). *Masalah BantuanPerkembangan Ekonomi Bagi Indonesia*. Jakarta: Djembatan.
- _____. (1971). *Membangun Koperasidan Koperasi Membangun*. Jakarta: Inti Idayu.
- _____. (1976). *Pikiran-Pikiran Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mencapai Kemakmuran yang Merata*. Jakarta: Yayasan Idayu.

- _____.(1985). Cita-Cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945, Dalam Sri Edi Swasono(penyunting),Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta: UI Press.
- _____.(2002). *Kumpulan Pidato III*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,
- _____.(2011). *Bukittinggi–Rotterdam Lewat Betawi*.Jakarta: Buku Kompas.
- _____.(2011). *Berjuang dan Dibuang*.Jakarta: Buku Kompas.
- _____.(2011). *Menuju Gerbang Kemerdekaan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Mubyarto.(1997).*Ekonomi Kerakyatan Program IDT dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.
- _____.(1999). *Reformasi Sistem Ekonomi : dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Muhammad. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho Notosusanto. (1971). *Sejarah Nasional VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (1993). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rikard Bangun. (2003). *Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sri Edi Swasono. (1985). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sritua Arief. (2002). *Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sugiharsono.(2001).*Koperasi Indonesia*. Jakarta: Direktorat PSMP.
- Suradjiman.(1963). *Ideologi Koperasi Membentuk Masyarakat Adil dan Makmur*. Bandung: Ganaco N.V.
- Swardi.(2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.